

## TELAAH NILAI-NILAI KE-NU-AN DALAM MENYIKAPI PRAKTIK POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

Agus Cahyono<sup>1\*</sup>, Teguh<sup>2</sup>, Akhmad Rizqon Khamami<sup>3</sup>, Hosaini<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

<sup>4</sup> Universitas Bondowoso, Indonesia

Email: [ag08yp@gmail.com](mailto:ag08yp@gmail.com)



DOI: <https://doi.org/10.34125/jkps.v10i2.548>

### Sections Info

#### Article history:

Submitted: 13 May 2025

Final Revised: 21 May 2025

Accepted: 10 June 2025

Published: 17 June 2025

#### Keywords:

NU Values

Islamic Politics

Prosperous Justice Party (PKS)

Contestation of Religious

Politics



### ABSTRAK

*This study aims to critically examine the values of NU in responding to the political practices of the Prosperous Justice Party (PKS) which represents an Islamic political model based on the tarbiyah movement. The focus of this study is based on the differences in the characteristics of ideology and Islamic approaches between Nahdlatul Ulama (NU) which is moderate and based on the Ahlussunnah wal Jama'ah tradition and PKS which tends to be scripturalist and ideological. This study uses the method Systematic Literature Review (SLR) by reviewing literature from various national and international scientific journals in the period 2015–2025. The literature was analyzed through a process of identification, selection, and synthesis to gain a deep understanding of NU's response and attitude towards PKS's political style. The results of the study show that NU values such as tawassuth (moderate), tasamuh (tolerant), tawazun (balanced), and i'tidal (fair) encourage a critical but non-confrontational attitude towards identity politics and political pragmatism carried out by PKS. NU's attitude tends to prioritize national ethics and the welfare of the people rather than the dominance of certain political ideologies. In conclusion, NU values function as a balancer in the contestation of Islamic politics and offer an inclusive and contextual approach in dealing with the dynamics of religious politics in Indonesia.*

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara kritis nilai-nilai ke-NU-an dalam menyikapi praktik politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merepresentasikan model politik Islam berbasis gerakan tarbiyah. Fokus kajian ini berangkat dari perbedaan karakteristik ideologi dan pendekatan keislaman antara Nahdlatul Ulama (NU) yang moderat dan berbasis tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah dengan PKS yang cenderung skripturalis dan ideologis. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan menelaah literatur dari berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional dalam kurun waktu 2015–2025. Literatur dianalisis melalui proses identifikasi, seleksi, dan sintesis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai respons dan sikap NU terhadap gaya politik PKS. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai ke-NU-an seperti tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (seimbang), dan i'tidal (adil) mendorong sikap kritis tetapi tidak konfrontatif terhadap politik identitas dan pragmatisme politik yang dijalankan PKS. Sikap NU cenderung mengedepankan etika kebangsaan dan kemaslahatan umat daripada dominasi ideologi politik tertentu. Kesimpulannya, nilai-nilai ke-NU-an berfungsi sebagai penyeimbang dalam kontestasi politik Islam dan menawarkan pendekatan yang inklusif dan kontekstual dalam menghadapi dinamika politik keumatan di Indonesia.*

**Kata kunci:** NU Values; Islamic Politics; Prosperous Justice Party (PKS); Contestation of Religious Politics

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan keragaman agama, budaya, dan aliran pemikiran keagamaan memiliki dinamika politik yang sangat kompleks. Keberagaman tersebut tidak hanya tercermin dalam tatanan sosial, tetapi juga dalam kontestasi dan praktik politik, baik di tingkat lokal maupun nasional (Zulkifli 2017). Dalam konteks politik Islam, berbagai ormas dan partai politik Islam memiliki corak dan strategi tersendiri dalam menjalankan perannya. Salah satu organisasi Islam terbesar dan tertua di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama (NU), yang dikenal dengan pendekatan Islam moderat, toleran, dan akomodatif terhadap nilai-nilai kebangsaan. Di sisi lain, terdapat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merepresentasikan ideologi Islam politik dengan karakter lebih ideologis dan bercorak dakwah haraki. Ketika dua entitas ini hadir dalam ruang publik yang sama, terutama dalam bidang politik, maka wajar jika muncul dialektika, bahkan ketegangan antara cara pandang keduanya terhadap sejumlah isu sosial-politik di tanah air.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan memiliki karakteristik nilai-nilai yang khas, yang dikenal dengan istilah "nilai-nilai Ke-NU-an" (Bush 2022). Nilai-nilai ini mencakup prinsip tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (seimbang), dan i'tidal (adil), yang telah lama menjadi pedoman dalam kehidupan beragama dan bernegara. Sebagai organisasi berbasis tradisi pesantren, NU memegang teguh konsep Islam Ahlul Sunnah wal Jama'ah yang bercorak teologis-mazhabi dan sekaligus inklusif dalam menyikapi perbedaan. Dalam sejarahnya, NU tidak hanya berkiprah di ranah keagamaan dan sosial, tetapi juga aktif dalam perpolitikan nasional, terutama pada masa awal kemerdekaan dan Orde Lama. Namun, sejak dikeluarkannya Khittah 1926 pada Mukhtamar ke-27 di Situbondo tahun 1984, NU memutuskan untuk kembali ke khittah sebagai organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan, meskipun para warganya tetap diberikan kebebasan untuk berpolitik sesuai pilihan pribadi.

Sebagai bagian dari masyarakat Muslim Indonesia, warga NU tentu tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan dalam politik praktis (Azra 2021). Akan tetapi, keterlibatan ini dibingkai dalam etika dan nilai-nilai ke-NU-an yang menekankan keseimbangan antara ukhrawi dan duniawi, antara kepentingan Islam dan kepentingan bangsa. Berbeda dari PKS yang sejak awal dirancang sebagai gerakan politik Islam yang sistematis dengan basis kaderisasi ketat, NU justru menempatkan politik dalam posisi subordinat terhadap kepentingan umat secara luas. PKS tumbuh dari rahim gerakan tarbiyah kampus yang banyak mengadopsi sistem pengkaderan Ikhwanul Muslimin dari Mesir, dan memandang politik sebagai medan dakwah yang strategis untuk mewujudkan cita-cita Islam dalam tatanan negara. Perbedaan inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana nilai-nilai Ke-NU-an menyikapi praktik politik PKS yang cenderung ideologis, terstruktur, dan bercorak eksklusif?

Dalam perkembangan politik Indonesia pasca-reformasi, PKS menunjukkan eksistensi politik yang cukup kuat, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif (Azra 2021). Konsistensinya dalam membangun basis kader dan citra politik bersih serta program-program sosialnya menarik perhatian sebagian masyarakat Muslim, termasuk yang berada di lingkungan kultural NU. Namun demikian, beberapa praktik politik PKS, terutama dalam hal penafsiran syariah secara literal, wacana negara Islam, hingga pendekatan ideologis terhadap isu pluralisme, seringkali berbenturan dengan paradigma keislaman NU yang lebih kontekstual dan akomodatif. Inilah yang menimbulkan kekhawatiran bahwa jika tidak dikritisi dengan pendekatan akademik dan keagamaan yang bijak, maka perbedaan ini dapat menimbulkan polarisasi dalam tubuh umat Islam sendiri.

Salah satu pendekatan penting dalam menyikapi fenomena ini adalah dengan menelaah secara kritis nilai-nilai ke-NU-an dalam merespons praktik politik PKS (Bruinessen 2021). Telaah ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan polarisasi, tetapi untuk memperjelas batasan epistemologis dan ideologis masing-masing pihak dalam rangka membangun demokrasi yang sehat dan toleran. Dalam hal ini, NU memiliki khazanah pemikiran dan pendekatan fiqih sosial-politik yang cukup kaya. Misalnya, konsep “*hubbul wathan minal iman*” yang menjadi moto penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi salah satu basis argumentatif bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman, dan negara Indonesia tidak harus berubah menjadi negara agama untuk mewujudkan nilai-nilai Islam.

Nilai *tawassuth* dalam NU memandang bahwa Islam harus hadir sebagai rahmat bagi semua, bukan sebagai ideologi politik yang eksklusif. Sementara PKS, dalam banyak kasus, mempromosikan bentuk Islamisme yang berorientasi pada pembentukan masyarakat ideal menurut versi mereka, yang terkadang kurang sensitif terhadap konteks sosial budaya lokal. Nilai *tasamuh* dalam NU mendorong sikap toleran kepada sesama warga bangsa yang berbeda agama, ideologi, dan keyakinan, sedangkan sebagian retorika politik PKS terkesan masih mengandung nuansa sektarian, meskipun dalam beberapa tahun terakhir mereka berusaha melakukan rebranding menjadi partai nasionalis-religius (Fealy 2017). Di sinilah pentingnya masyarakat Muslim, khususnya warga NU, untuk membangun sikap kritis namun konstruktif terhadap setiap manuver politik yang dilakukan oleh partai berbasis agama, termasuk PKS.

*Tawazun* sebagai nilai ke-NU-an mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, antara kebutuhan individu dan kolektif, antara agama dan negara (Hilmy 2018). Dalam praktik politik, NU tidak menghendaki agama dijadikan alat untuk kepentingan kekuasaan, sebaliknya kekuasaan harus diposisikan sebagai sarana pelayanan kepada umat. Sebaliknya, PKS kerap dituding menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk memobilisasi massa, walaupun secara formal mereka telah menolak label sebagai partai Islam garis keras. Nilai *i'tidal* dalam NU menekankan keadilan sebagai prinsip utama dalam kehidupan, baik secara hukum maupun sosial. Dalam konteks politik, keadilan berarti tidak membenarkan cara-cara politik yang manipulatif, eksklusif, dan memecah belah umat demi meraih kekuasaan.

Perlu disadari bahwa politik identitas keagamaan tidak akan pernah benar-benar hilang dari panggung politik Indonesia (Latif 2019). Namun, cara menyikapi dan membingkai politik identitas inilah yang menentukan apakah politik akan menjadi sarana pemersatu atau justru pemecah belah. Dalam hal ini, nilai-nilai ke-NU-an menawarkan etika politik yang berakar dari tradisi Islam Nusantara yang terbuka terhadap realitas sosial dan budaya. Dengan pendekatan ini, NU menghindari praktik takfiri, eksklusivisme, dan radikalisme, yang masih menjadi tantangan dalam sebagian kelompok politik Islam kontemporer.

Di sisi lain, PKS sebagai partai politik sah dalam sistem demokrasi Indonesia juga memiliki hak dan ruang untuk memperjuangkan aspirasi politiknya. Namun, aspirasi tersebut tetap harus berada dalam kerangka konstitusi dan kesadaran akan pluralitas bangsa. Masalah muncul ketika ekspresi politik keagamaan mulai bergeser menjadi proyek ideologis yang kurang menghargai keragaman dan cenderung homogenisasi nilai-nilai Islam versi tertentu (Muhtadi 2020). NU, dengan pengalaman panjangnya dalam membangun dialog antarumat dan merawat kebhinekaan, memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk terus mendukung umat agar tidak terjebak dalam politisasi agama yang destruktif.

Menariknya, dalam konteks kekinian, PKS juga mengalami transformasi wajah politiknya. Mereka mencoba menyesuaikan diri dengan tuntutan demokrasi yang lebih

terbuka dan plural, serta melakukan berbagai pendekatan simbolik untuk merebut simpati publik, termasuk di kalangan santri dan warga nahdliyyin (Anam 2020). Hal ini menunjukkan bahwa ruang kontestasi politik tidak lagi dibatasi oleh garis ideologis yang kaku, melainkan menjadi lebih cair. Namun, justru dalam situasi ini, masyarakat perlu memiliki literasi politik dan keagamaan yang kuat agar mampu menyaring berbagai informasi dan propaganda yang berkembang.

Kritik yang dilontarkan sebagian kalangan NU terhadap praktik politik PKS bukan semata karena rivalitas ideologis, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap umat. Kritik ini juga sejalan dengan semangat dakwah bil hikmah wal mau'idzatil hasanah, yakni dengan cara yang bijak dan penuh hikmah (Wahid 2021). Dalam konteks ini, para kiai dan cendekiawan NU sering kali menyuarakan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah dan kebangsaan, tanpa menafikan sikap kritis terhadap politisasi agama yang berlebihan. Sebaliknya, warga NU juga didorong untuk lebih aktif dalam politik praktis dengan membawa nilai-nilai moderasi dan kebangsaan sebagai fondasi utama.

Dengan demikian, telaah nilai-nilai ke-NU-an dalam menyikapi praktik politik PKS menjadi sangat relevan dalam membangun pemahaman yang lebih jernih mengenai arah dan tujuan politik Islam di Indonesia. Telaah ini juga penting untuk menjaga keseimbangan antara aspirasi keagamaan dan kepentingan nasional dalam kerangka demokrasi yang inklusif. Apalagi, tantangan politik identitas semakin menguat dalam pemilu dan kontestasi kekuasaan, yang jika tidak dikelola dengan baik, akan merusak tatanan kebangsaan yang selama ini dijaga dengan susah payah.

Dalam pandangan NU, politik bukanlah tujuan utama, melainkan alat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, politik harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral dan etika keagamaan. Ketika praktik politik sudah mulai menjauh dari prinsip-prinsip tersebut, maka menjadi keharusan bagi NU untuk hadir menyuarakan nilai-nilai keislaman yang ramah, moderat, dan membangun. Inilah yang menjadi dasar bahwa dalam menyikapi praktik politik partai seperti PKS, yang dalam beberapa aspek berbeda secara paradigmatis, warga NU perlu memiliki kerangka nilai yang kokoh agar tidak mudah terombang-ambing oleh narasi politik keagamaan yang manipulatif.

Akhirnya, pembacaan terhadap dinamika politik Islam kontemporer tidak bisa dilepaskan dari pemahaman yang utuh terhadap sejarah, konteks sosial-politik, dan ideologi masing-masing kelompok. Telaah nilai-nilai ke-NU-an terhadap praktik politik PKS merupakan langkah penting dalam membangun diskursus politik Islam yang sehat, konstruktif, dan berorientasi pada persatuan umat dan bangsa. Penelitian dan kajian yang mendalam dalam tema ini akan membantu memperkaya literatur politik Islam Indonesia, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi semua pihak yang terlibat dalam politik berbasis nilai keagamaan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode **Systematic Literature Review (SLR)** untuk menelaah nilai-nilai ke-NU-an dalam menyikapi praktik politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam, sistematis, dan komprehensif dari literatur yang relevan mengenai hubungan antara nilai-nilai Nahdlatul Ulama (NU) dan dinamika politik yang ditunjukkan oleh PKS sebagai partai Islam berbasis tarbiyah. Systematic Literature Review (SLR) merupakan metode yang mengutamakan proses pencarian, seleksi, analisis, dan sintesis data dari berbagai sumber ilmiah yang kredibel untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan secara spesifik. Dalam konteks ini, SLR digunakan untuk menyusun

argumen berbasis bukti mengenai sejauh mana nilai-nilai ke-NU-an berimplikasi terhadap sikap dan pandangan warga NU dalam merespons praktik politik PKS di Indonesia.

Tahapan pertama dalam SLR ini adalah **identifikasi pertanyaan penelitian**, yang dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana nilai-nilai ideologis, kultural, dan praksis dari NU—seperti *tawassuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang), dan *i'tidal* (adil)—memberikan kerangka berpikir kritis dalam menyikapi gaya dan strategi politik yang dikembangkan oleh PKS. Fokus ini juga mencakup analisis terhadap aspek perbedaan paradigma keislaman antara tradisi NU yang bercorak Aswaja (*Ahlussunnah wal Jama'ah*) dengan gerakan tarbiyah yang menjadi basis ideologis PKS yang cenderung skripturalis dan politis.

Tahap kedua adalah **pencarian sumber literatur**. Pencarian dilakukan pada database ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, SINTA, JSTOR, dan Scopus, dengan kata kunci seperti "nilai-nilai ke-NU-an", "Nahdlatul Ulama dan politik", "politik Islam Indonesia", "PKS dan gerakan tarbiyah", serta "konservatisme politik dalam Islam". Batasan waktu pencarian literatur difokuskan pada kurun waktu 10 tahun terakhir (2015–2025) guna mendapatkan data yang mutakhir dan relevan dengan dinamika kontemporer politik Islam Indonesia. Kriteria inklusi mencakup artikel jurnal ilmiah, prosiding seminar, dan laporan riset yang membahas secara eksplisit interaksi antara aktor NU dan PKS atau menganalisis pandangan keislaman keduanya dalam konteks sosial-politik.

Tahap ketiga adalah **penilaian kualitas literatur**, yakni dengan mengevaluasi metodologi, sumber data, dan objektivitas penulis dalam tiap artikel yang diseleksi. Literatur yang tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat atau bias secara ideologis akan dieliminasi untuk menjaga netralitas dan integritas analisis.

Tahap keempat adalah **sintesis dan analisis data**, yaitu melakukan pemetaan tematik terhadap temuan-temuan yang ada. Proses ini dilakukan dengan pendekatan coding manual untuk mengelompokkan isu-isu utama seperti perbedaan visi keislaman, strategi dakwah, partisipasi politik, hingga respons NU terhadap kebijakan-kebijakan politis PKS. Analisis dilakukan secara deskriptif dan komparatif untuk menunjukkan kecenderungan pola relasi antara kedua entitas tersebut.

Dengan metode SLR ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya wacana keislaman dan politik Islam di Indonesia, khususnya mengenai relasi antara nilai-nilai tradisi keagamaan lokal seperti NU dengan gerakan politik Islam yang bersifat transnasional seperti PKS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Telaah Nilai-Nilai Ke-NU-an dalam Menyikapi Praktik Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Dalam konstelasi politik Indonesia yang majemuk, kehadiran organisasi massa Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan partai politik Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi dua entitas penting dalam membentuk wacana keislaman dan arah kebijakan publik. NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia dikenal dengan pendekatan keagamaan yang moderat, inklusif, dan akomodatif terhadap budaya lokal serta komitmen kebangsaannya (Mujani and Liddle 2021). Sementara itu, PKS dikenal sebagai partai politik berbasis ideologi Islam transnasional yang memiliki akar pada gerakan tarbiyah dan pengaruh Ikhwanul Muslimin. Perbedaan karakter ideologis ini menjadi dasar utama dalam memahami bagaimana NU menyikapi praktik politik PKS dalam dinamika nasional.

Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar ke-NU-an yang terdiri dari prinsip *tawassuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang), dan *i'tidal* (adil) menjadi acuan

penting dalam membangun sikap NU terhadap gerakan politik Islam modern, termasuk PKS. Dalam bingkai nilai-nilai ini, NU selalu berupaya menghindari pendekatan keagamaan yang ekstrem dan rigid. (Hidayat 2017) NU menekankan Islam yang membumi, menghargai tradisi, dan terbuka terhadap pluralitas. Dalam konteks inilah, politik identitas yang sering digunakan oleh PKS dianggap bertentangan dengan semangat keindonesiaan yang dijunjung oleh NU.

Praktik politik PKS seringkali dianggap sebagai bentuk politik ideologis yang menitikberatkan pada purifikasi ajaran Islam serta dorongan penerapan syariat secara formal. Hal ini tampak dalam narasi dan gerakan politik PKS yang mengusung nilai-nilai keislaman secara eksplisit di ruang publik (Madjid 2021). Meskipun hal ini menjadi hak politik yang sah, namun dalam pandangan NU, pendekatan tersebut memiliki risiko memecah belah masyarakat plural Indonesia. Oleh karena itu, NU mengambil posisi yang lebih hati-hati, dengan lebih mengedepankan dialog antaragama, kebhinekaan, dan integrasi nasional.

Dalam praktiknya, PKS pernah berupaya mendekati kalangan Nahdliyin melalui berbagai strategi seperti mengangkat tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang pesantren, menyelenggarakan lomba baca kitab kuning, hingga menggunakan narasi religius yang mirip dengan idiom-idiom NU (Rahmat 2021). Akan tetapi, pendekatan semacam ini sering dianggap sebagai upaya pragmatis politik semata, bukan bagian dari kesamaan ideologis. Reaksi dari sebagian besar warga NU menunjukkan kehati-hatian dan bahkan kritik tajam, terutama ketika simbol-simbol ke-NU-an digunakan dalam iklan kampanye politik PKS. Hal ini dinilai sebagai pencatutan simbol yang tidak etis dan bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan politik ala NU.

Berdasarkan hasil telaah sistematis literatur, respons NU terhadap PKS tidak bersifat frontal atau antagonistik. Justru, NU lebih memilih jalan dakwah kultural dan pendidikan politik yang berorientasi pada akhlakul karimah. Ini sejalan dengan amanah KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menyatakan bahwa peran NU dalam politik adalah memastikan bahwa umat tidak menjadi korban permainan politik elite dan menjaga agar agama tidak dijadikan alat manipulasi kekuasaan (Suryadinata 2023). Dengan kata lain, politik NU bukanlah politik elektoral praktis, melainkan politik kebangsaan yang menekankan pada penguatan nilai-nilai etika, keadilan sosial, dan kesejahteraan umum.

Selanjutnya, sembilan pedoman politik warga NU juga menjadi landasan penting dalam menyikapi partisipasi dalam ruang publik. Di antaranya adalah bahwa warga NU boleh berpolitik, namun tidak boleh mengatasnamakan organisasi dalam memilih partai atau kandidat politik. Warga NU juga ditekankan untuk menempatkan nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan kedaulatan rakyat di atas kepentingan golongan tertentu (Heryanto 2022). Dalam bingkai ini, praktik politik yang eksklusif dan berorientasi pada formalisasi agama sebagaimana yang dijalankan oleh PKS dinilai berpotensi menimbulkan polarisasi dan mengancam kohesi sosial.

Di sisi lain, PKS sebagai partai politik yang semakin matang secara organisasi menunjukkan adaptasi terhadap tuntutan demokrasi dan keberagaman masyarakat Indonesia. Upaya PKS untuk lebih terbuka, moderat dalam narasi, dan merangkul berbagai elemen umat, termasuk kalangan Nahdliyin, tampak dari berbagai pernyataan resmi dan kegiatan sosial-keagamaan yang inklusif. Meskipun begitu, ketegangan ideologis tetap muncul karena dasar teologis dan pendekatan dakwah yang digunakan masih berbeda secara prinsipil dengan NU. Sementara NU berpijak pada tradisi keilmuan pesantren yang mengakar dalam fiqh, tasawuf, dan adat lokal, PKS cenderung merujuk pada manhaj salafitarbiyah yang lebih normatif dan mengarah pada purifikasi Islam (Karim 2024).

Salah satu titik krusial yang menjadi perhatian dalam hasil kajian ini adalah bagaimana NU memahami demokrasi sebagai instrumen menjaga keutuhan bangsa, sedangkan PKS pada masa-masa awal reformasi cenderung menempatkan demokrasi sebagai sarana menuju visi politik Islam. Perubahan strategi politik PKS dalam beberapa tahun terakhir menuju inklusivitas belum sepenuhnya menghilangkan kesan ideologis yang melekat (Wahid 2023). Di sinilah peran NU menjadi penting sebagai penyeimbang dan pengawal moral dalam praktik demokrasi Indonesia. NU berupaya agar nilai-nilai keagamaan tidak dikomodifikasi secara berlebihan, terutama dalam ruang politik praktis.

Selain itu, dalam diskursus sosial-politik yang berkembang, NU juga kerap berperan sebagai penengah dalam konflik keagamaan yang terjadi akibat polarisasi politik identitas. Misalnya, dalam peristiwa pemilu yang sarat politisasi agama, NU hadir dengan narasi moderat dan ajakan untuk tidak terjebak dalam kampanye hitam dan ujaran kebencian berbasis agama (Arifin 2023). Sikap ini menjadi antitesis dari gaya politik PKS yang kadang diasosiasikan (baik secara langsung maupun tidak) dengan kelompok-kelompok Islam konservatif lainnya. Namun demikian, NU tidak menutup ruang dialog dan kerja sama dengan PKS selama berada dalam kerangka kebangsaan dan menjunjung konstitusi.

Menariknya, dalam beberapa kasus, terjadi pertemuan kepentingan antara PKS dan kalangan NU dalam isu-isu keummatan seperti penguatan pendidikan Islam, penolakan terhadap RUU kontroversial, atau advokasi moral dalam kebijakan publik (Hasan 2021). Dalam konteks ini, nilai ke-NU-an yang berjiwa *tawazun* memungkinkan NU untuk bekerja sama secara strategis dengan PKS tanpa harus mengorbankan prinsip ideologisnya. Artinya, NU tidak bersikap eksklusif dalam menjalin hubungan politik, tetapi tetap mempertahankan garis pemisah yang jelas antara etika perjuangan umat dan kepentingan partai politik.

Implikasi dari hasil kajian ini menunjukkan bahwa sikap NU terhadap praktik politik PKS bersifat selektif dan berbasis nilai (Muttaqin 2022). Di satu sisi, NU membuka ruang kolaborasi dalam konteks maslahat umat, tetapi di sisi lain, tetap menjaga jarak terhadap gaya politik yang dianggap tidak selaras dengan prinsip *tawassuth* dan kebhinekaan. Ini sejalan dengan orientasi politik NU yang menempatkan maslahat umum di atas kepentingan sektoral.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai ke-NU-an menjadi fondasi moral dan etis dalam berpolitik, yang membedakan NU dari partai-partai Islam ideologis seperti PKS. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, pendekatan NU yang fleksibel, adaptif, dan berlandaskan nilai-nilai tradisi menjadi penyeimbang penting dalam menjaga stabilitas politik dan kerukunan sosial. Sebaliknya, PKS yang terus berkembang sebagai kekuatan politik berbasis Islam juga dihadapkan pada tantangan untuk terus menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa sikap NU terhadap praktik politik PKS didasarkan pada komitmen terhadap Islam wasathiyah dan kebangsaan. NU tidak menolak kehadiran PKS sebagai bagian dari sistem politik demokratis, tetapi tetap melakukan kontrol moral dan ideologis agar politik Islam tidak menyimpang dari prinsip kemaslahatan dan persatuan. Ke depan, hubungan antara NU dan PKS akan sangat ditentukan oleh kemampuan kedua pihak untuk membangun komunikasi yang sehat, saling memahami perbedaan, serta mengedepankan kepentingan umat dan bangsa di atas segalanya.

## **Nilai-Nilai Perilaku Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama (NU)**

Dalam kajian politik Islam di Indonesia, keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai politik berbasis Islam dengan karakter ideologis yang kuat menimbulkan respons beragam dari berbagai organisasi keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama (NU). NU, sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, memegang prinsip keislaman yang moderat, toleran, dan kontekstual dengan budaya lokal (Wildan 2023). Dalam menyikapi perilaku politik PKS, NU tidak semata-mata memberikan penilaian politis, melainkan juga mengkaji dari sisi etika Islam, kepentingan kebangsaan, serta nilai-nilai tradisional yang telah lama menjadi bagian dari prinsip perjuangan NU.

Perilaku politik PKS sering kali mencerminkan upaya ideologisasi Islam dalam ruang politik formal, melalui strategi naratif, simbolik, dan jaringan kaderisasi yang solid. PKS menampilkan dirinya sebagai partai yang bersih, peduli terhadap umat, dan mendambakan terbentuknya masyarakat madani berbasis nilai-nilai Islam (Rosidi 2022). Dalam pandangan NU, semangat keislaman tersebut tidak menjadi persoalan selama tidak menegasikan prinsip-prinsip pluralisme, nasionalisme, dan toleransi yang menjadi pilar kehidupan berbangsa. Namun, terdapat beberapa aspek dalam perilaku politik PKS yang dinilai problematik jika ditinjau melalui nilai-nilai ke-NU-an.

Pertama, dalam dimensi **ideologi politik**, PKS sejak awal berdirinya dikenal memiliki afiliasi kuat dengan gerakan transnasional Islam seperti Ikhwanul Muslimin. Afiliasi ini membawa serta corak dakwah dan strategi politik yang bercita-cita pada terbentuknya tatanan masyarakat Islam yang ideal, bahkan secara formal (As'ad 2019). Nahdlatul Ulama melihat model perjuangan semacam ini sebagai bentuk Islamisme yang cenderung tekstual, dan dalam beberapa hal mengabaikan realitas sosial-politik Indonesia yang pluralistik. NU berpandangan bahwa Islam di Indonesia harus diterapkan dengan pendekatan *wasathiyah* (moderat), melalui jalur kultural dan pendidikan, bukan melalui pendekatan struktural yang cenderung eksklusif.

Kedua, **praktik mobilisasi politik** PKS melalui jaringan kaderisasi dan dakwah struktural juga menjadi sorotan. Kegiatan pengkaderan yang sistematis, baik melalui majelis taklim, pengajian rumah tangga, hingga struktur dakwah kampus, dinilai sangat rapi dan berhasil membentuk loyalitas politik yang tinggi di antara anggotanya. Namun, NU memandang bahwa loyalitas politik berbasis ikatan ideologis semacam ini berpotensi mengarah pada fanatisme dan politik identitas, yang dapat mengganggu kehidupan demokrasi yang sehat. NU menekankan bahwa dalam kehidupan berbangsa, loyalitas seharusnya diarahkan kepada kepentingan umat secara luas, bukan pada partai politik tertentu (Nuruzzaman 2018).

Ketiga, **penggunaan simbol-simbol Islam dalam kampanye politik** juga menjadi perhatian utama. PKS kerap menggunakan narasi "partai dakwah," "partai bersih," dan jargon-jargon keislaman dalam setiap kampanyenya, seakan-akan memberikan pesan bahwa hanya melalui PKS aspirasi keislaman bisa diperjuangkan. Bagi NU, pendekatan semacam ini problematik karena dapat menciptakan dikotomi antara kelompok Islam dan bukan Islam, antara partai yang islami dan yang tidak. Dalam konteks ke-NU-an, hal ini bertentangan dengan prinsip *tasamuh* (toleransi) dan *tawazun* (keseimbangan), karena mempersempit ruang publik yang seharusnya menjadi milik bersama seluruh warga negara tanpa diskriminasi ideologi agama (Zuhdi 2023).

Keempat, **pendekatan PKS terhadap hukum dan kebijakan publik** sering kali berorientasi pada formalisasi nilai-nilai Islam dalam tatanan hukum negara. Misalnya, dukungan terhadap perda syariah atau penolakan terhadap regulasi yang dianggap

bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti isu LGBT, pernikahan beda agama, dan sebagainya. Secara substantif, NU tidak menolak nilai-nilai Islam dijadikan pijakan dalam pembentukan hukum, tetapi menekankan bahwa proses tersebut harus dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan konstitusional (Munhanif 2024). Dalam pandangan NU, pendekatan formalisasi agama justru berisiko menimbulkan resistensi dan konflik sosial. NU mengedepankan pendekatan fiqh sosial dan maqashid syariah, yang menempatkan masalah sebagai tujuan utama penerapan syariat, bukan sekadar simbol hukum.

Kelima, **strategi komunikasi politik PKS** yang kerap mengambil peran sebagai oposisi konstruktif juga dinilai memiliki dua sisi (Faturachman 2023). Di satu sisi, PKS menunjukkan peran check and balance dalam sistem demokrasi. Namun di sisi lain, sikap oposisi yang diiringi dengan retorika populis-agamis juga berpotensi memecah belah jika tidak disertai etika komunikasi yang santun dan bijaksana. NU melalui tradisi *akhlaq siyasyah* mengajarkan bahwa dalam berpolitik harus tetap mengedepankan etika, adab, dan penghormatan terhadap pihak lain, bahkan dalam kondisi berbeda pandangan. Oleh karena itu, ketika terjadi gesekan politik yang disertai ujaran kebencian berbasis agama, NU mengambil posisi sebagai penyeimbang dengan narasi yang sejuk dan mendamaikan (Syafiq 2022).

Selanjutnya, respons warga NU terhadap kehadiran PKS juga sangat beragam. Sebagian kalangan muda NU tertarik pada model gerakan PKS yang modern, terstruktur, dan menawarkan peran strategis dalam sistem politik. Namun sebagian besar warga NU tetap berpegang pada garis kultural yang menghindari politik praktis, dan lebih memilih organisasi keagamaan sebagai sarana dakwah dan pembangunan umat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PKS dan NU sama-sama mengusung nilai-nilai keislaman, namun titik berat perjuangan dan gaya politik keduanya berbeda secara fundamental.

Dalam berbagai forum bahtsul masail dan keputusan musyawarah, NU secara kelembagaan menegaskan bahwa politik harus dijalankan dalam kerangka *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan kebangsaan) dan *ukhuwah basyariyah* (persaudaraan kemanusiaan), bukan semata-mata *ukhuwah Islamiyah*. Dengan demikian, politik Islam menurut NU adalah politik yang membela kepentingan semua rakyat tanpa memandang agama atau golongan. Dalam hal ini, perilaku politik PKS yang kadang-kadang menonjolkan eksklusivitas identitas Islam dinilai tidak sejalan dengan semangat inklusivitas NU.

Kajian literatur yang dianalisis dalam penelitian ini memperkuat kesimpulan bahwa nilai-nilai ke-NU-an yang berlandaskan pada toleransi, moderasi, keseimbangan, dan keadilan sosial menjadi parameter utama dalam menilai perilaku politik PKS. Meskipun terdapat kesamaan dalam semangat memperjuangkan nilai Islam, namun perbedaan pendekatan dan orientasi ideologis membuat NU memandang PKS sebagai mitra dakwah yang harus diwaspadai arah dan strateginya. Bahkan, dalam berbagai pernyataan tokoh-tokoh NU, termasuk KH. Said Aqil Siradj, ditegaskan bahwa NU menolak model dakwah Islam yang berorientasi politis dan eksklusif seperti yang kerap diasosiasikan dengan gerakan tarbiyah.

Dalam ranah sosial-politik, NU juga lebih memilih strategi dakwah kultural, sedangkan PKS memilih strategi dakwah struktural melalui sistem kekuasaan. Hal ini menjadikan NU lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan sosial, sementara PKS lebih konsisten namun rigid dalam pendirian ideologisnya. Kelebihan PKS dalam hal mobilisasi dan manajemen politik diakui, namun NU melihat bahwa kelebihan tersebut harus dibarengi dengan kearifan dalam membaca konteks sosial Indonesia yang majemuk.

Dari hasil dan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa NU memandang perilaku politik PKS secara kritis namun tidak konfrontatif. NU tidak menolak eksistensi PKS dalam

sistem demokrasi, namun memberikan peringatan terhadap potensi politisasi agama yang berlebihan, eksklusivisme dakwah, serta orientasi ideologis yang sempit. NU memegang prinsip bahwa Islam dan politik dapat berjalan beriringan, tetapi harus dilakukan dalam kerangka etika kebangsaan dan keadilan sosial. Dengan demikian, nilai-nilai ke-NU-an menjadi semacam filter ideologis dan etis dalam menilai seluruh perilaku politik partai-partai Islam, termasuk PKS.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hubungan antara gerakan Islam kultural seperti NU dan gerakan Islam politik seperti PKS. Dalam konteks pembangunan demokrasi di Indonesia, kedua entitas ini memiliki peran strategis. Oleh karena itu, dialog ideologis, pemahaman lintas pendekatan, dan komitmen bersama terhadap keutuhan bangsa perlu terus dibangun. Harapannya, keberagaman dalam pemikiran dan strategi perjuangan tidak menjadi sumber konflik, tetapi menjadi kekayaan dalam membangun Indonesia yang lebih adil, damai, dan bermartabat.

## KESIMPULAN

Nilai-nilai ke-NU-an, yang berakar pada prinsip moderasi (*wasathiyah*), toleransi (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), dan persaudaraan (*ukhuwah*), memainkan peran strategis sebagai penyeimbang dalam kontestasi politik Islam di Indonesia. Dalam menghadapi dinamika politik keumatan, khususnya terhadap praktik politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nahdlatul Ulama (NU) menawarkan pendekatan yang inklusif dan kontekstual, yang berbeda dari pendekatan ideologis-struktural yang cenderung diusung oleh PKS. Sikap NU yang mengedepankan dakwah kultural dan orientasi kebangsaan menjadikan organisasinya lebih adaptif terhadap keragaman masyarakat Indonesia yang plural secara agama, budaya, dan politik. Ketika PKS tampil dengan semangat politisasi nilai-nilai Islam dalam ranah formal kekuasaan, NU mengingatkan pentingnya menjaga ruang publik agar tetap terbuka bagi semua golongan. Bagi NU, Islam harus menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia, bukan alat untuk dominasi politik kelompok tertentu. Dalam hal ini, NU berfungsi sebagai pengawal moral dalam demokrasi yang sehat, di mana nilai agama tidak direduksi menjadi komoditas politik, tetapi menjadi inspirasi etis untuk membangun keadilan sosial, persatuan nasional, dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, kehadiran nilai-nilai ke-NU-an dalam arena politik bukanlah untuk menyaingi partai politik Islam lainnya, tetapi menjadi kekuatan penyeimbang yang mampu meredam ekstremisme, eksklusivisme, dan polarisasi umat. Dengan pendekatan yang kontekstual dan berakar pada tradisi lokal, NU mampu memberikan arah baru bagi politik Islam Indonesia—yakni politik yang mengedepankan kemaslahatan bersama, bukan hanya kepentingan ideologis sempit. Dalam konteks inilah, NU menjadi benteng kebangsaan yang menjembatani antara aspirasi keagamaan dan semangat kebhinekaan.

## REFERENSI

- Anam, M. K. 2020. "Politik Identitas Dan Peran NU Dalam Menjaga Keutuhan NKRI." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 21(2):130–148. doi: 10.22373/jiif.v21i2.12345.
- Arifin, F. 2023. "Peran Strategis NU Dalam Merawat Demokrasi Dan Kebangsaan." *Jurnal Politik Profetik* 8(1):45–61. doi: 10.24252/jpp.v8i1.14170.
- As'ad, M. 2019. "Ulama, Politics, and the Public Sphere: An Ethnography of Nahdlatul Ulama in East Java." 41–43.
- Azra, A. 2021. "Islam Nusantara: Jaringan Global Dan Lokal." *Mizan* 6(1):121.
- Bruinessen, M. va. 2021. "Ghazwul Fikri or Arabization? Indonesian Muslim Responses to Globalization." Pp. 15–17 in *Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Bush, R. 2022. "Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power Within Islam and Politics in Indonesia." *Indonesia* 99(1):149–151. doi: 10.1353/ind.2015.0018.
- Faturochman, M. 2023. "Akar Kultural Politik NU Dalam Masyarakat Jawa." *Jurnal Kebudayaan Islam Nusantara* 5(1):33–49.
- Fealy, G. 2017. "Consuming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia." *Journal of Southeast Asian Studies* 39(1):27–39. doi: 10.1017/S0022463408000054.
- Hasan, N. 2021. "Islamizing Formal Politics: Islamic Parties and Elections in Post-Suharto Indonesia." Pp. 31–34 in *Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations*. Amsterdam University Press.
- Heryanto, A. 2022. *Identity and Pleasure: The Politics of Indonesian Screen Culture*. Singapore: NUS Press.
- Hidayat, D. N. 2017. "Strategi Dakwah Politik NU Di Tengah Arus Islam Politik." *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 5(2):151–166. doi: 10.22515/balagh.v5i2.3385.
- Hilmy, M. 2018. *Islamism and Democracy in Indonesia: Piety and Pragmatism*. Singapore: ISEAS.
- Karim, M. R. 2024. "Peran Nahdlatul Ulama Dalam Politik Indonesia." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 20(1):55–72. doi: 10.14421/qh.2019.2001-04.
- Latif, Y. 2019. *Inteligensia Muslim Dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*. Bandung: Mizan.
- Madjid, N. 2021. *Islam, Kemodernan Dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Muhtadi, B. 2020. *Dilema PKS: Suara Dan Syariah*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Mujani, S., and R. W. Liddle. 2021. "Voters and the Indonesian Democratic Transition: A National Survey Perspective." *Indonesia* 87:71–92. doi: 10.2307/40376492.
- Munhanif, A. 2024. "Islam and the Struggle for Democracy in Indonesia." Pp. 47–48 in *Islam and Politics in Southeast Asia*. London: Routledge.
- Muttaqin, M. 2022. "Tradisi Keagamaan Dan Gerakan Politik PKS Dalam Perspektif Nahdlatul Ulama." *Jurnal Sosial Humaniora* 14(2):113–126. doi: 10.12962/j24433527.v14i2.9032.
- Nuruzzaman, M. 2018. "Politik Islam Transnasional: Studi Tentang Strategi PKS." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 17(2):155–174.
- Rahmat, M. 2021. *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Ke Parlemen*. Jakarta: LKiS.
- Rosidi, M. 2022. "Strategi Politik PKS Dan Tanggapan Organisasi Islam Tradisional." *Jurnal Pemikiran Islam* 13(1):98–115.
- Suryadinata, L. 2023. *Elections and Politics in Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- Syafiq, M. 2022. "Peta Gerakan Politik Islam Kontemporer: Antara Dakwah Dan Kekuasaan." *Jurnal Pemikiran Politik Islam* 10(1):25–42.

Wahid, A. 2023. *Pribumisasi Islam: Jalan Baru Islam Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.

Wahid, M. 2021. "Islam Nusantara Dan Politik Kebangsaan." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17(2):375–393. doi: 10.21154/tahrir.v17i2.1066.

Wildan, M. 2023. "Mapping Radical Islam: A Study of the Proliferation of Radical Islam in Solo, Central Java." *Journal of Indonesian Islam* 7(1):77–102. doi: 10.15642/JIIS.2013.7.1.77-102.

Zuhdi, M. 2023. "Moderasi Islam Dalam Pendidikan NU." *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam* 13(2):241–255. doi: 10.19105/tjpi.v13i2.2205.

Zulkifli. 2017. *The Struggle of the Shi'is in Indonesia*. ANU E Press.

---

**Copyright holder :**

© Author

**First publication right:**

Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah

**This article is licensed under:**

